

Analisis Pemanfaatan Aplikasi Asn Digital Berbasis Web Untuk Mendukung Administrasi Pemerintahan Di Kecamatan Kota, Kota Kediri

Birnadhita Marsya¹, Ardieansyah²

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: birnadhitamarsya@gmail.com¹, ardieansyah@ipdn.ac.id²

Published: July, 2025

ABSTRACT

Government administration at the sub-district level still faces various challenges, such as slow document management processes, inefficiency, and limited utilization of digital technology. This study aims to analyze the use of the web-based ASN Digital application in supporting the improvement of administrative effectiveness in Kecamatan Kota, Kediri City. The application integrates several key features, including Agenda, Mail, and Minutes, and is equipped with a digital signature function as part of bureaucratic digital transformation. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews with sub-district civil servants (ASN), and documentation. The results show that the implementation of the ASN Digital application can accelerate administrative workflows, facilitate digital archive tracking, and enhance work efficiency and accountability among civil servants. The digital signature feature also simplifies the validation process without requiring physical presence. The conclusion of this study is that the ASN Digital application has a positive impact on administrative governance at the sub-district level. However, improvements are still needed in terms of human resource training and strengthening of supporting infrastructure to ensure optimal implementation.

Keywords: *ASN Digital, Government Administration, Web Application, Bureaucratic Digitalization.*

ABSTRAK

Administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti proses pengelolaan dokumen yang lambat, kurang efisien, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi ASN Digital berbasis web dalam mendukung peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan di Kecamatan Kota Kediri. Aplikasi ini merupakan integrasi dari beberapa fitur utama, yaitu Agenda, Surat, dan Notulen, serta dilengkapi dengan fasilitas tanda tangan digital sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara kepada ASN kecamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi ASN Digital mampu mempercepat alur administrasi, mempermudah pelacakan arsip digital, serta meningkatkan efisiensi kerja dan akuntabilitas ASN. Fitur tanda tangan digital juga memberikan kemudahan dalam proses validasi tanpa kehadiran fisik. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi ASN Digital memberikan dampak positif terhadap tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal pelatihan SDM dan penguatan infrastruktur pendukung agar implementasi dapat berjalan optimal.

Kata kunci: ASN Digital, administrasi pemerintahan, aplikasi web, digitalisasi birokrasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan telah menjadi keniscayaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menetapkan bahwa setiap instansi pemerintahan wajib mengintegrasikan teknologi informasi dalam seluruh proses administrasi untuk mewujudkan birokrasi yang modern dan efisien (Peraturan Presiden RI, 2018). Implementasi sistem digital tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga dituntut untuk menjangkau instansi pemerintahan di tingkat lokal, termasuk kecamatan, sebagai unit kerja terdekat dengan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Kediri telah mengatur pelaksanaan SPBE melalui Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 jo. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan transparansi administrasi pemerintahan, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan aplikasi berbasis web dalam administrasi publik mampu mempercepat pengelolaan dokumen, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperkuat pengawasan internal (Nugroho, 2020). Penambahan fitur seperti tanda tangan digital juga dinilai efektif dalam menjamin keabsahan dokumen dan fleksibilitas kerja, terutama di masa pascapandemi (Raharjo & Siregar, 2021). Namun, penerapan sistem semacam itu masih dominan ditemukan pada instansi pemerintahan di tingkat kementerian, pemerintah provinsi, atau kota besar. Sementara itu, studi yang secara khusus menelaah implementasi aplikasi administrasi digital pada level kecamatan masih sangat terbatas, padahal kecamatan merupakan pelaksana sebagian besar urusan pemerintahan langsung di masyarakat.

Artikel ini berangkat dari kebutuhan akan kajian empiris mengenai penerapan aplikasi digital administrasi di level kecamatan. Penelitian ini mengkaji penggunaan aplikasi ASN Digital berbasis web yang diterapkan di Kecamatan Kota Kediri, yang mengintegrasikan tiga fitur utama yaitu pengelolaan agenda, surat, dan notulen, serta dilengkapi dengan sistem tanda tangan digital. Integrasi tersebut bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan kertas, dan meningkatkan keterlacakan dokumen secara elektronik.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana efektivitas aplikasi ASN Digital dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis sejauh mana aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja ASN, memperkuat sistem dokumentasi internal, dan mendukung kebijakan digitalisasi pemerintahan lokal secara nyata.

METODE

Metode penelitian merupakan implementasi penting untuk memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu mengenai efektivitas pemanfaatan aplikasi ASN Digital berbasis web dalam mendukung administrasi pemerintahan di Kecamatan Kota Kediri. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pemanfaatan teknologi digital oleh aparatur pemerintahan tingkat kecamatan.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan pengalaman langsung para ASN sebagai pengguna aplikasi ASN Digital. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bersifat

naturalistik dan lebih menekankan pada makna, proses, serta pemahaman secara menyeluruh terhadap objek yang diteliti, bukan sekadar pengukuran angka.

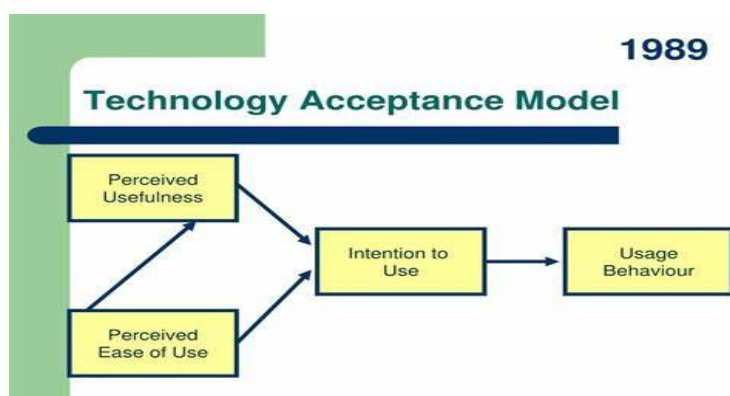
Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kota Kediri, yang menjadi salah satu instansi yang telah mengimplementasikan aplikasi ASN Digital untuk keperluan administrasi seperti pengelolaan agenda kegiatan, surat-menyurat, notulen rapat, dan tanda tangan digital. Subjek penelitian adalah para ASN yang secara langsung menggunakan aplikasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari, meliputi sekretaris camat, staf administrasi, dan operator sistem.

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, digunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:

1. Observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan kerja ASN untuk mengamati penggunaan aplikasi secara langsung.
2. Wawancara mendalam (in-depth interview), yang dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan kunci, guna menggali pengalaman, persepsi, serta hambatan dalam penggunaan aplikasi ASN Digital.
3. Dokumentasi, meliputi pengumpulan dokumen administratif, screenshot aplikasi, serta arsip digital yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi berbasis web.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan analisis. TAM dikembangkan oleh Davis (1989) dan banyak digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Model ini menekankan dua variabel utama, yaitu Perceived Usefulness (persepsi manfaat) dan Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan penggunaan), yang menentukan sikap pengguna terhadap teknologi dan niat mereka untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana ASN menerima aplikasi ASN Digital, apakah aplikasi tersebut dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan, serta hambatan apa saja yang memengaruhi tingkat adopsi teknologi ini di lingkungan pemerintahan kecamatan.



Gambar 1.
Teori Technology

Model (TAM)

Kerangka
Acceptance

Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana ASN menerima aplikasi ASN Digital, apakah aplikasi tersebut dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan, serta hambatan apa saja yang memengaruhi tingkat adopsi teknologi ini di lingkungan pemerintahan kecamatan.

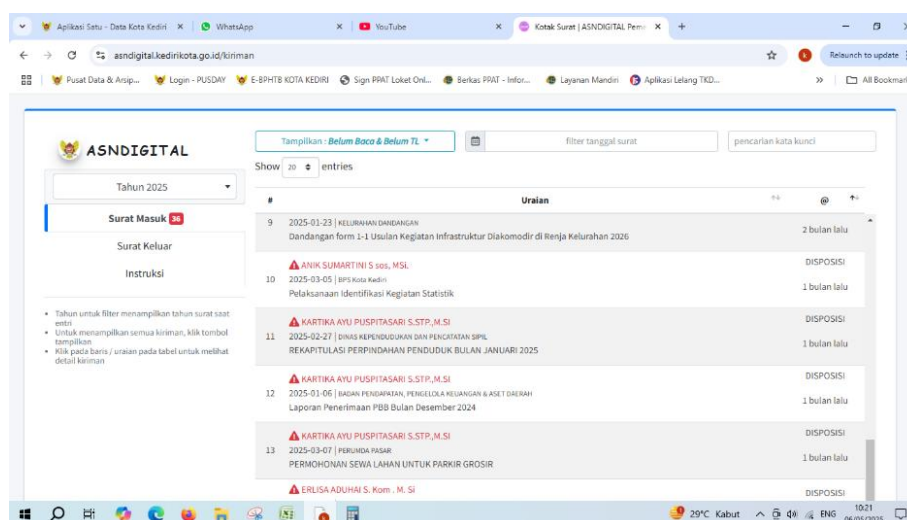
HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceived Usefulness (PU) – Manfaat yang Dirasakan dari Penggunaan Aplikasi ASN Digital

Perceived Usefulness (PU) atau persepsi terhadap kegunaan, menurut Davis (1989), merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, hal ini mengacu pada sejauh mana aplikasi digital mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pekerjaan administratif ASN. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kota, Kota Kediri, merasakan manfaat langsung dari penggunaan Aplikasi ASN Digital. Aplikasi ini secara nyata membantu mempercepat proses kerja, mempermudah koordinasi lintas unit, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen resmi.

Menurut Al-Qirim (2007), kesuksesan transformasi digital di sektor publik sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap manfaat sistem. Sistem yang mampu mengurangi beban kerja, mempercepat proses pelayanan, serta menghadirkan akuntabilitas tinggi akan lebih diterima secara luas di lingkungan birokrasi. Indrajit (2006) juga menyatakan bahwa sistem informasi pemerintahan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh bagaimana teknologi tersebut menyentuh langsung pada permasalahan administratif yang nyata di lapangan.

Dengan demikian, ASN Digital telah memenuhi prinsip dasar PU dalam TAM, karena menghadirkan nilai tambah administratif yang relevan, mengintegrasikan alur kerja penting seperti surat masuk, keluar, dan disposisi ke dalam satu platform, dan mempercepat validasi keputusan melalui tanda tangan digital.



Gambar 2. Menu Surat Masuk dan Surat Keluar

Sumber: website ASN DIGITAL Kota Kediri

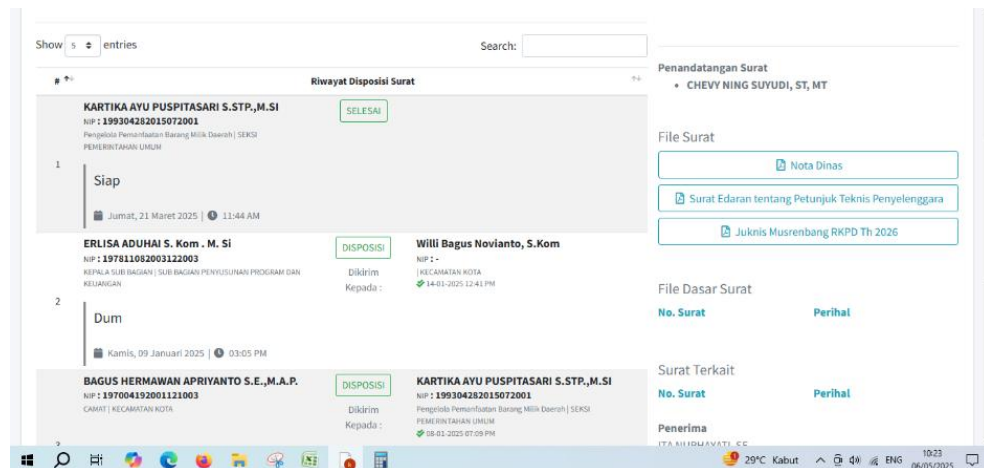
Gambar 2 menampilkan antarmuka aplikasi ASN DIGITAL Kota Kediri pada menu *Surat Masuk dan Surat Keluar*. Tampilan ini merupakan salah satu fitur utama yang mendukung percepatan proses administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan dokumen surat-menyurat secara digital. Melalui menu ini, ASN dapat dengan mudah:

1. Melihat daftar surat masuk secara real-time.
2. Mengetahui status disposisi masing-masing surat.
3. Menyaring surat berdasarkan tahun, tanggal, atau kata kunci tertentu.
4. Melakukan tindakan lanjutan seperti disposisi atau penerusan secara digital.

Antarmuka yang sederhana dan informatif ini memperkuat temuan wawancara yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi sangat membantu dalam mempercepat

alur surat dinas antar unit kerja tanpa perlu melalui jalur fisik. Hal ini sesuai dengan indikator *Perceived Usefulness* yang menekankan efisiensi dan peningkatan kinerja sebagai dampak dari penggunaan sistem teknologi informasi (Davis, 1989).

Lebih lanjut, fitur ini juga mendukung prinsip akuntabilitas karena seluruh histori surat dan tindak lanjutnya terdokumentasi secara digital dan dapat diakses oleh pejabat berwenang sesuai hak aksesnya. Dengan demikian, aplikasi ini memberikan transparansi serta mengurangi risiko kehilangan dokumen atau keterlambatan disposisi, sebagaimana juga ditegaskan dalam temuan wawancara responden yang menyebutkan, "Sekarang disposisi surat tidak perlu menunggu tanda tangan langsung, bisa langsung dari aplikasi." (Responden 2).



Gambar 3. Riwayat Disposisi Surat
Sumber: website ASN DIGITAL Kota Kediri

Gambar 2 memperlihatkan antarmuka fitur Riwayat Disposisi Surat pada aplikasi ASN DIGITAL Kota Kediri. Fitur ini merupakan bagian dari sistem manajemen surat yang memungkinkan proses disposisi dilakukan secara digital dan terdokumentasi secara sistematis. Dalam gambar tersebut terlihat status surat (Siap, Selesai), waktu pengiriman, serta nama pejabat pengirim dan penerima disposisi. Fungsi utama fitur ini adalah:

1. Mencatat alur pengiriman surat antar pejabat.
2. Memberikan transparansi dalam proses administrasi.
3. Menghindari kehilangan surat karena jejak digital tersimpan otomatis.
4. Mempercepat tindak lanjut karena disposisi dapat dikirim tanpa harus menunggu tatap muka atau tanda tangan manual.

Temuan ini mendukung salah satu pernyataan responden:

"Sekarang disposisi surat tidak perlu menunggu tanda tangan langsung, bisa langsung dari aplikasi." (Responden 2). Dengan adanya catatan riwayat disposisi seperti yang ditampilkan dalam dokumentasi, seluruh proses dapat dimonitor dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan efisien. Ini sesuai dengan teori *Perceived Usefulness* dari Davis (1989) yang menyatakan bahwa sistem informasi akan lebih mudah diterima oleh pengguna jika terbukti dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pekerjaan. Lebih lanjut, menurut Heeks (2006) dalam kajian *e-Government Success and Failure*, salah satu indikator keberhasilan implementasi teknologi informasi di pemerintahan adalah kemampuan sistem untuk memberikan *information traceability* dan *accountability*, yang dalam konteks ini dapat dilihat dari dokumentasi riwayat disposisi digital.

Dengan demikian, fitur ini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, sekaligus menurunkan ketergantungan pada prosedur manual yang lambat dan rawan kesalahan.

Perceived Ease of Use (PEOU) – Kemudahan Penggunaan Aplikasi ASN Digital

Perceived Ease of Use (PEOU) merupakan salah satu konsep kunci dalam Technology Acceptance Model (TAM) yang dijelaskan oleh Davis (1989) sebagai sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan suatu sistem tidak memerlukan usaha yang besar. Dalam konteks aplikasi ASN Digital di Kecamatan Kota Kediri, kemudahan penggunaan menjadi faktor krusial yang memengaruhi penerimaan dan efektivitas implementasi aplikasi ini oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi ASN Digital secara umum dinilai mudah digunakan dan membantu proses administrasi. Kemudahan ini tercermin dari beberapa aspek, antara lain antarmuka yang sederhana, navigasi yang jelas, dan adanya video tutorial yang memudahkan pengguna memahami langkah-langkah pengoperasian aplikasi. Menurut Nielsen (1993), usability atau kegunaan suatu sistem sangat bergantung pada desain antarmuka yang intuitif dan konsisten, yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan berlebih. Video tutorial yang tersedia merupakan implementasi dari prinsip ini, meminimalkan kurva belajar bagi ASN yang kurang familiar dengan teknologi digital.

Fitur pengelolaan surat masuk dan keluar serta disposisi surat dianggap sangat efektif dan efisien dalam mempercepat alur administrasi antar OPD. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya mudah digunakan tetapi juga memenuhi fungsi utama yang diharapkan oleh pengguna, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Davis (1989) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem akan meningkatkan sikap positif pengguna dan memperbesar kemungkinan mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan.

Namun, kendala teknis seperti server yang terkadang down menjadi hambatan yang dapat mengurangi pengalaman pengguna. Menurut DeLone dan McLean (2003) dalam model kualitas sistem informasi, stabilitas sistem dan ketersediaan layanan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepuasan dan keberlanjutan penggunaan sistem informasi. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur TI yang andal sangat diperlukan agar kemudahan penggunaan tidak terganggu oleh masalah teknis.

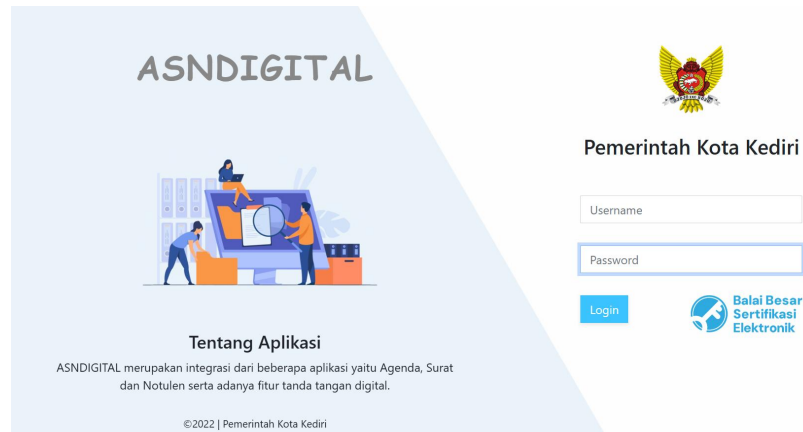
Selain itu, fitur tanda tangan digital yang hanya dapat digunakan oleh kepala OPD dan telah terverifikasi melalui sistem BSRE, walaupun menjaga keamanan dan legalitas dokumen, menimbulkan ketergantungan pada beberapa pihak tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian agar proses validasi dokumen tetap efisien tanpa mengurangi aspek keamanan. Menurut Heeks (2006), dalam konteks e-Government, keseimbangan antara kemudahan akses dan keamanan adalah hal yang sangat penting agar sistem dapat diterima oleh pengguna sekaligus memenuhi standar pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan fitur lain seperti notulen rapat yang jarang digunakan di tingkat kecamatan dan fitur agenda yang hanya digunakan dalam konteks tertentu juga menunjukkan bahwa kebutuhan pengguna sangat beragam. Menurut Venkatesh dan Bala (2008), konteks penggunaan dan relevansi fitur sangat memengaruhi persepsi kemudahan dan manfaat sistem. Oleh karena itu, aplikasi ASN Digital perlu terus dikembangkan secara adaptif agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna di setiap level pemerintahan.

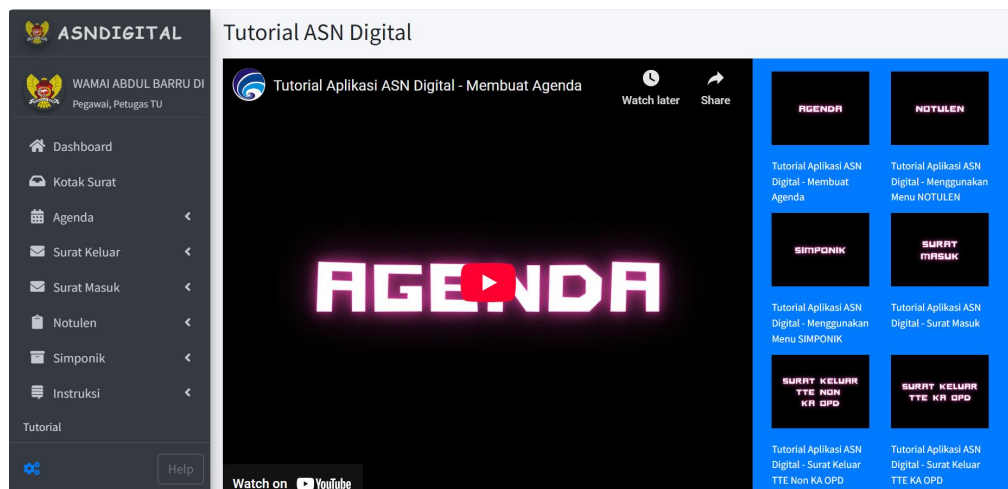
Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Diskominfo pada saat peluncuran aplikasi turut membantu mengenalkan aplikasi kepada ASN. Menurut Rogers (2003) dalam teori difusi inovasi, komunikasi dan sosialisasi merupakan kunci dalam mempercepat adopsi teknologi baru. Meski demikian, hasil wawancara menunjukkan perlunya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan agar ASN semakin terbiasa dan mampu memaksimalkan penggunaan aplikasi.

Kesimpulannya, persepsi kemudahan penggunaan aplikasi ASN Digital di Kecamatan Kota Kediri cukup positif, didukung oleh desain yang user-friendly dan

adanya fasilitas pembelajaran berupa video tutorial. Kendala teknis dan kebutuhan pelatihan tambahan menjadi fokus untuk perbaikan ke depan. Dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, aplikasi ini dapat lebih optimal mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan kecamatan secara berkelanjutan.



Gambar 4. Halaman Utama Aplikasi ASN DIGITAL
Sumber: website ASN DIGITAL Kota Kediri



Gambar 5. Tutorial Penggunaan Fitur ASN DIGITAL
Sumber: website ASN DIGITAL Kota Kediri

Gambar 4 memperlihatkan fitur tutorial pada aplikasi ASN Digital yang menyediakan video panduan penggunaan berbagai menu seperti Agenda, Notulen, Simponik, Surat Masuk, dan Surat Keluar. Keberadaan fitur ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan perceived ease of use (PEOU), yaitu persepsi pengguna bahwa aplikasi ini mudah digunakan. Dalam konteks model Technology Acceptance Model (TAM), PEOU menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan teknologi. Video tutorial ini memungkinkan pengguna untuk mempelajari cara penggunaan aplikasi secara mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pelatihan tatap muka, dan meningkatkan kepercayaan diri ASN dalam menjalankan tugas administrasi secara digital. Dengan demikian, fitur tutorial ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga memperkuat persepsi kemudahan penggunaan yang menjadi landasan penting dalam adopsi sistem digital oleh aparatur pemerintah.

Kendala dan Tantangan Implementasi

Implementasi aplikasi ASN Digital berbasis web di Kecamatan Kota, Kota Kediri menunjukkan hasil yang cukup positif dalam mendukung efektivitas administrasi pemerintahan. Namun demikian, seperti halnya proses adopsi teknologi informasi pada umumnya, sejumlah kendala dan tantangan masih dihadapi dalam tahap implementasi di lapangan. Hal ini penting untuk dicermati agar penerapan aplikasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan optimal.

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dari hasil wawancara adalah persoalan stabilitas infrastruktur teknis, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan dan keandalan server. Ketergantungan sistem terhadap konektivitas dan server pusat menjadi hambatan ketika terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan aplikasi tidak dapat diakses. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu ASN, "*Kadang aplikasi tidak bisa dibuka kalau server-nya down, jadi kita harus tunggu dulu sampai normal.*" Gangguan seperti ini tidak hanya menghambat alur kerja administratif, tetapi juga dapat menurunkan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*) sebagaimana dikemukakan dalam kerangka Technology Acceptance Model (Davis, 1989).

Dalam perspektif TAM, gangguan teknis seperti server yang tidak stabil merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan sistem. Ketika sistem tidak dapat diakses secara konsisten, hal ini akan berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap reliabilitas sistem serta menurunkan intensi pengguna untuk terus mengadopsinya dalam jangka panjang.

Selain kendala teknis, aspek kebijakan akses dan otorisasi penggunaan fitur tertentu juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, penggunaan tanda tangan digital yang saat ini hanya diperuntukkan bagi kepala OPD. Hal ini membatasi pemanfaatan fitur secara lebih luas, terutama untuk kebutuhan administrasi yang memerlukan kecepatan dan efisiensi di tingkat lebih rendah seperti sekretariat kecamatan.

Dari sisi fitur, tidak semua menu dalam aplikasi dimanfaatkan secara optimal di tingkat kecamatan. Fitur *notulen* misalnya, jarang digunakan karena tidak relevan dengan kebutuhan kerja harian, sedangkan fitur *agenda* umumnya hanya digunakan dalam konteks peminjaman ruangan di lingkungan Pemerintah Kota dan dikelola oleh Diskominfo bagian umum. Rendahnya pemanfaatan fitur tertentu dapat dikaitkan dengan kurangnya *perceived usefulness* atau persepsi terhadap manfaat aktual dari fitur tersebut bagi pengguna di unit kerja spesifik.

Di sisi lain, upaya pengenalan awal aplikasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo saat peluncuran dinilai cukup membantu proses adopsi awal. Namun, terbatasnya pelatihan lanjutan serta minimnya pendampingan teknis berkelanjutan dapat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung, dukungan kebijakan yang inklusif, serta pemahaman pengguna terhadap manfaat dan kemudahan sistem. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keberlanjutan implementasi ASN Digital, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap performa teknis, perluasan akses terhadap fitur strategis, dan penyusunan strategi sosialisasi yang adaptif terhadap kebutuhan unit kerja di tingkat kecamatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi ASN Digital berbasis web dalam mendukung administrasi pemerintahan di Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap lima orang ASN,

ditemukan bahwa aplikasi ini secara umum diterima dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas serta efisiensi kerja, khususnya dalam pengelolaan surat-menyurat, disposisi, dan percepatan layanan antar-OPD.

Kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan adopsi, ditunjang oleh desain antarmuka yang sederhana serta adanya media pendukung berupa video tutorial. Sementara itu, persepsi terhadap kegunaan (Perceived Usefulness) tercermin dari peningkatan kecepatan layanan administrasi dan integrasi antarunit kerja.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi belum sepenuhnya merata. Kendala teknis seperti ketergantungan pada server yang terkadang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap fitur tanda tangan digital, dan rendahnya pemanfaatan beberapa fitur (seperti notulen) menunjukkan bahwa faktor eksternal dan kontekstual juga berperan dalam menentukan tingkat penerimaan teknologi oleh ASN.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ASN Digital memiliki potensi kuat untuk mendukung tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih efisien, namun tetap memerlukan dukungan berkelanjutan dalam bentuk penguatan infrastruktur, pelatihan teknis, serta adaptasi fitur sesuai kebutuhan unit kerja di tingkat lokal. Ke depan, studi lanjutan dapat diarahkan untuk mengevaluasi dampak kuantitatif dari pemanfaatan aplikasi ini terhadap kinerja birokrasi, serta memperluas cakupan responden pada tingkat OPD lain dan kecamatan berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan representatif.

REFERENSI

- Al-Qirim, N. (2007). An empirical investigation of an e-government adoption model for government organisations. *Electronic Government*, 4(3), 333-345. <https://doi.org/10.1504/EG.2007.013661>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Kediri. Walikota. (2019). *Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.go.id/perwalikota/kediri-nomor-42-tahun-2019.html>
- Kediri. Walikota. (2022). *Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.go.id/perwalikota/kediri-nomor-22-tahun-2022.html>
- Kurniawan, S. H., & Nugroho, Y. (2020). Implementasi aplikasi e-government untuk peningkatan pelayanan publik di era digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(2), 123-130. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202071123>
- Raharjo, B., & Siregar, M. (2021). The impact of digital signatures on government document security and employee productivity in the post-pandemic era. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(2), 45-60. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i2.18614>
- Republik Indonesia. Presiden. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. <https://peraturan.go.id/perpres/nomor-95-tahun-2018.html>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision Sciences*, 39(2), 273-315.